

Pendidikan Anak Perempuan Dalam Perspektif Budaya Patriarki (Studi Pada Budaya Lamaholot)

D Hyronimus

Universitas Musamus

Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611

Email: dodhyhyronimus@unmus.ac.id

Abstract

Genealogical gender equality is not an attempt to unite differences. Gender differences are not a problem as long as they do not give birth to gender inequalities. The discourse on gender injustice is coherent with the marginalization, subordination, stereotypes and violence that seem to be attached to women. Lamaholot culture is representative of patriarchal culture, where justice for women often stutters to pronounce. The repressive Lamaholot culture starts from the family environment so that it can be easily accepted by the community. The role of women in the family and society is not simply eliminated but limited by existing conventions. The Lamaholot culture condemns women as being underestimated in the division of roles so that women lose opportunities to grow, one of which is the opportunity to obtain education from their parents. The purpose of this research is to identify and describe the impact of Lamaholot culture (as part of patriarchal culture) on girls' education using a qualitative approach, the results of which are descriptive analysis. The results of the study show that based on considerations of Lamaholot cultural understanding, boys are a priority for parents in terms of opportunities to get an education, while girls are not prioritized so that there is a gap in access to education between boys and girls which results in girls losing the opportunity to get a proper education.

Keywords: Lamaholot Culture, Patriarchal Culture, Girls' Education

Abstrak

Kesetaraan gender secara genealogis bukan merupakan upaya untuk mempersatukan perbedaan. Perbedaan gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan gender inequalities. Diskursus mengenai ketidakadilan gender koheren dengan marginalisasi, subordinasi, stereotipe, dan kekerasan yang sepertinya melekat pada kaum perempuan. Budaya Lamaholot merupakan representatif dari budaya patriarki, dimana keadilan pada perempuan seringkali gagap untuk diucapkan. Budaya Lamaholot yang bersifat represif dimulai dari lingkungan keluarga sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat tidak semata dihilangkan melainkan dibatasi oleh konvensi yang ada. Budaya Lamaholot memvonis perempuan sebagai bagian yang disepelihkan dalam pembagian peran sehingga perempuan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh, salah satunya adalah kesempatan memperoleh pendidikan dari orang tua. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan dampak budaya Lamaholot (sebagai bagian dari budaya patriarki) pada pendidikan anak perempuan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil analisisnya bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pertimbangan paham budaya Lamaholot anak laki – laki menjadi prioritas orang tua dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan, sedangkan anak perempuan tidak menjadi bagian yang diprioritaskan sehingga terjadi kesenjangan akses pendidikan antara anak laki –

laki dan perempuan yang berakibat anak perempuan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Kata kunci: Budaya Lamaholot, Budaya Patriarki, Pendidikan Anak Perempuan

I. PENDAHULUAN

Kesetaraan gender secara genealogis bukan merupakan upaya untuk mempersatukan perbedaan. Perbedaan gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan *gender inequalities*. Diskursus mengenai ketidakadilan gender koheren dengan marginalisasi, subordinasi, stereotipe, dan kekerasan yang sepeertinya melekat pada kaum perempuan. Secara ideal, perempuan tentu menginginkan persamaan peran pada segala dimensi kesehariannya seperti menjadi bagian dalam pembagian peran yang adil dengan laki-laki adalah salah satu ekspektasi yang dianggungkan perempuan. Sebagai manusia, perempuan lahir dengan naluri yang sama untuk maju dan berjalan beriringan bersama kaum laki - laki namun benturan sekat - sekat budaya yang telah dikonstruksi oleh masyarakat secara turun temurun mengakibatkan disparitas pada peran laki - laki dan perempuan terjadi. Salah satu budaya yang gemar “dikambinghitamkan” menjadi pemicu ketidakadilan gender adalah budaya patriarki. Budaya patriarki mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan ruang dominasi pada kaum laki - laki sehingga laki-laki adalah yang utama, dan melakukan kendali terhadap wanita (Nursaptini, 2019).

Asbabun nuzul patriarki menurut Sakina (2017) digunakan untuk menyebut laki - laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala - galanya, yang kemudian istilah ini digunakan secara lebih umum guna menggambarkan kondisi perempuan yang dikuasai oleh laki - laki melalui macam-macam cara. Logika patriarki adalah suatu belenggu bagi perempuan akibat dominasi laki - laki yang berlebihan mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan bahkan pendidikan. Belenggu ini tidak bersumber dari laki - laki melainkan norma dan nilai budaya yang bersifat imperatif dimana menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya (Alfian Rokhmansyah, 2016). Patriarki selanjutnya dianggap sebagai suatu ideologi sebagai pola perilaku masyarakat dimana pelestarian dan proses sosialisasinya telah membentuk pencitraan yang sangat kuat pada identitas gender dalam relasi sosial (Anwar: 2017).

Budaya Lamaholot merupakan representatif dari budaya patriarki, dimana keadilan pada perempuan seringkali gagap untuk diucapkan. Secara spesifik budaya Lamaholot merupakan rumpun budaya yang dianut oleh beberapa daerah yang dekat secara geografis, melingkupi wilayah dari *Au' Gatang Matang* di sekitar perbatasan kabupaten Sikka-Flores

Timur, Hikong, Boganatar (di barat) sampai ke *Kolana Baranus*, yang disebut *Tanah Muna Seli* dan *Keroko Puken Leping Batan* yang merupakan sebutan untuk kabupaten/pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Budaya ini dianut oleh beberapa daerah yang secara letak geografisnya memiliki jarak yang cukup dekat yakni Flores timur, Adonara, Solor dan Lembata. Keempat wilayah ini menganut tata cara atau aturan adat istiadat yang sama atau serumpun, baik upacara atau ritual adat, adat perkawinan, penggunaan bahasa, kesamaan alat kesenian (alat musik, tarian daerah dan pakaian adat) serta beberapa aspek lainnya.

Budaya Lamaholot yang bersifat represif dimulai dari lingkungan keluarga sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat tidak semata dihilangkan melainkan dibatasi oleh konvensi yang ada. Sakina (2017) mengungkapkan bahwa diskriminasi pada perempuan dapat terjadi di masyarakat karena adanya pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki. Budaya Lamaholot memvonis perempuan sebagai bagian yang disepelkan dalam pembagian peran sehingga perempuan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh, salah satunya adalah kesempatan memperoleh Pendidikan dari orang tua. Pandangan ini disetujui oleh Sutisna (2019) bahwa budaya paternalistik dan ideologi patriarki yang dianut masyarakat membatasi akses perempuan dalam memperoleh pendidikan

Pendidikan secara normatif merupakan hak bagi seluruh rakyat sebagaimana yang tersirat dalam undang – undang dasar 1945 bukan diklaim sepihak sebagai bagian dari gender tertentu. Dari segi pembiayaan, pemerintah telah mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan baik perempuan maupun laki – laki melalui fasilitas pada pendidikan dasar yang kemudian dikenal dengan wajib belajar 9 tahun. Namun demikian, masih banyak warga negara yang belum dapat mengakses pendidikan, khususnya perempuan. Kesenjangan pendidikan antara perempuan dan laki – laki jelas terlihat di di desa Waipukang, kecamatan Ile Ape, kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang merupakan bagian dari budaya Lamaholot. Kondisi ini dibuktikan dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020/2021 bahwa capaian pembangunan manusia laki – laki lebih tinggi dibanding perempuan. Tercatat bahwa IPM laki – laki mencapai 69,27 sementara IPM perempuan sebesar 63,20 (Badan Pusat Statistik, 2021). Data di atas, secara konseptual menunjukkan bahwa terdapat disparitas gender.

Pendidikan menurut Utami (2019) merupakan aspek penting yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter suatu bangsa. Kualitas pendidikan umum menentukan kualitas sumber daya manusia suatu negara dan mempengaruhi aspek lain seperti partisipasi

politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Sekalipun telah terdapat upaya untuk lebih banyak keadilan dan kesetaraan gender dalam pendidikan namun masalah ini sebenarnya tidak benar – benar hilang. Diskriminasi gender masih ada dan memanifestasikan dirinya dalam segala cara yang tidak bisa dibayangkan. Muncul dan berkembangnya stereotip yang mengklasifikasikan perempuan lebih lemah dari laki-laki menyebabkan meningkatnya ketidaksetaraan gender di masyarakat (Sulistiyowati: 2020). Budaya Lamaholot mendorong perempuan untuk terus ditindas dan dieksploitasi.

Kesenjangan antara perempuan dan laki – laki tercipta dari keluarga. Keluarga dapat menciptakan kesenjangan sosial dengan meningkatkan pemahaman akan budaya patriarki yang menganggap laki – laki adalah yang mendominasi atau wajib diprioritaskan (Kiram: 2020). Budaya Lamaholot memprioritaskan anak laki – laki sebagai yang pertama memperoleh kesempatan pendidikan dari orang tua. Keadaan ini dapat dimungkinkan oleh karena bagian dari pengamalan kepada budaya Lamaholot yang masih melekat di masyarakat dan diwariskan secara transgenerasi. Selain itu, persepsi kapitalis masih menjadi bagian dari budaya ini. Dalam budaya Lamaholot, keuntungan seperti menjadi tolak ukur kesempatan pendidikan akan diberikan kepada anak. Apabila anak laki – laki diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan maka keuntungan mutlak berada di sisi orang tua/keluarga. Anak laki – laki dalam pandangan budaya Lamaholot merupakan pewaris suku sehingga hasil dari pendidikannya dapat menjadi penopang hidup suku, keluarga dan orang tua kedepannya. Konsep ini kontradiktif dengan yang dialami anak perempuan. Dalam budaya perkawinan Lamaholot, anak perempuan sering kali dianggap sebagai “penghasil *belis*” (mas kawin) sehingga tanpa adanya tunjangan pendidikan, anak perempuan telah memiliki “*value*” tersendiri yang tidak dimiliki oleh anak laki – laki. Dari anggapan itulah, anak perempuan seringkali tidak diperhatikan secara utuh akan pendidikannya.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan dampak budaya Lamaholot (sebagai bagian dari budaya patriarki) pada pendidikan anak perempuan. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk menyadarkan orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan, mengedukasi tentang budaya patriarki yang kian membelenggu kaum perempuan, serta mengajak semua pihak terkhusus orang tua untuk mengkritisi budaya Lamaholot sebagai bagian dari budaya patriarki. Dalam konteks pluralitas budaya terutama tatanan budaya patriarki yang cenderung mendiskreditkan kaum perempuan, perlu dibangun pemahaman yang konstruktif kepada seluruh masyarakat serta mengajak masyarakat penganut budaya Lamaholot untuk lebih terbuka kepada dialog dan kritik budaya yang selalu bersifat dinamis. Hal ini diupayakan dalam rangka memberikan ruang atas hak-hak asasi perempuan sehingga

tidak lagi dibelenggu oleh adat istiadat Lamaholot yang merupakan bagian dari budaya patriarki, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, hasil analisisnya bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam, yang digambarkan dengan kata-kata. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Observasi dilakukan pada kehidupan sehari – hari responden dalam hal ini orang tua dan anak yang memiliki anak usia sekolah, pemerhati pendidikan, kepala suku dan masyarakat dengan bentuk observasi partisipatif. Adapun wawancara dilakukan dengan menggunakan 2 macam wawancara yaitu wawancara terstruktur dengan pedoman wawancara dan wawancara tak berstruktur atau tanpa pedoman, mengingat beberapa responden masih dalam kondisi buta aksara.

Penelitian dilakukan di desa Waipukang, kecamatan Ile Ape, kabupaten Lembata sebagai salah satu wilayah representatif dari budaya Lamaholot. Aktivitas analisis data yang dilakukan adalah data yang diperoleh di lapangan direduksi, dirangkum, dan dipilih hal-hal yang pokok untuk difokuskan pada titik masalah kemudian data disajikan secara sederhana sehingga dapat dengan mudah memberikan kesimpulan.

Definisi operasional pada penelitian ini adalah (1) budaya Lamaholot, adalah bagian dari budaya patriarki dimana kesempatan “lebih” ada pada anak laki – laki. Sedangkan (2) pendidikan anak perempuan adalah kesempatan akan akses pendidikan yang diperoleh oleh anak perempuan dalam budaya Lamaholot.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam proses pengambilan keputusan, pedoman ada pada budaya Lamaholot, termasuk keputusan memberikan akses pendidikan kepada anak. Keputusan ini menimbulkan kesenjangan pendidikan antara anak laki – laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Bapak MK bahwa perempuan hanya sebatas pelengkap yang hanya memperoleh hak pendidikan setelah anak laki – laki. Anggapan ini lahir akibat dari paham budaya Lamaholot yang menganggap anak laki – laki merupakan *anak suku* (ahli waris) yang nantinya memiliki kontribusi yang besar untuk kemajuan suku. Sedangkan perempuan sering kali dianggap pelengkap hanya karena minimnya kontribusi perempuan setelah menikah.

Budaya setempat meyakini bahwa pasca menikah, anak perempuan akan keluar dari lingkaran suku dan bergabung bersama suku pasangannya sehingga segala bentuk kontribusi dari perempuan teralihkan ke pihak keluarga atau suku dari pasangannya. Dari persepsi tersebut, orang tua merasa dirugikan apabila memberikan akses pendidikan untuk anak perempuan.

Hasil observasi menyampaikan hal serupa dimana anak laki – laki menjadi prioritas akan akses pendidikan termasuk pendidikan dasar. Dilahirkan sebagai anak laki-laki menurut paham Lamaholot adalah anak yang siap menjadi penyambung “tongkat estafet” keluarga dan suku. Anak laki-laki dipahami sebagai “ana suku” atau anak suku/pewaris suku sehingga suku dan keluarga berkewajiban untuk melindungi, memperhatikan, diprioritaskan dan tidak tergantikan karena kelak ia akan berguna bagi keluarga dan sukunya. Persepsi ini disetujui oleh salah satu kepala suku Bapak LB yang menyampaikan bahwa pendidikan anak laki – laki menjadi hal yang penting karena kelak dia (anak laki – laki) menjadi penopang perkembangan suku dengan sumbangan material maupun non material.

Anggapan lain datang dari Ibu MO sebagai orang tua yang mengutarakan bahwa menjadi anak perempuan sudah sejatinya menerima dan memahami konsep budaya Lamaholot. Orang tua tidak mengalami kerugian apabila memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenyam pendidikan. Sejatinya, anak perempuan menurut paham Lamaholot, akan memberikan keuntungan kepada keluarga pasca menikah. Hasil dari pernikahan anak perempuan memberikan dampak bagi suku dan keluarga dimana mas kawin atau lazim disebut “*belis*” menjadi hak keluarga dan suku. Oleh karena itu, pendidikan bukan menjadi hal yang penting untuk perempuan. Relevan dengan hasil observasi, ditemukan kesenjangan hak dan kewajiban dari anak laki-laki dan anak perempuan diantaranya anak laki- laki diberikan hak untuk sekolah sedangkan anak perempuan tidak demikian. Keluarga BL misalnya hanya menyekolahkan anak laki-laki hingga ke pendidikan tinggi sementara anak perempuan tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah dan mengabdikan kepada orangtua di rumah.

Kendatipun anak perempuan diberikan akses pendidikan, perlakuan orang tua terhadap anak perempuan, jelas berbeda. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi bahwa anak laki - laki selalu diunggulkan dalam hal pendidikan, mulai dari kesenjangan fasilitas sekolah hingga perlakuan orang tua. Orang tua hanya menawarkan anak laki-laki pilihan fasilitas yang baik, misalnya berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan, sarapan disiapkan sebelum berangkat sekolah, perlengkapan sekolah disediakan oleh orang tua (seragam sekolah, tas, alat tulis). Sementara itu, perlakuan berbeda dialami oleh anak perempuan. Aktivitas pagi sebelum berangkat sekolah adalah mengerjakan pekerjaan rumah bahkan membantu orang tua menyiapkan fasilitas sekolah untuk anak laki – laki.

Selain itu terdapat fakta lain yang menjadi konsekuensi apabila anak perempuan akhirnya diberikan akses pendidikan oleh orang tua. Menurut informan penelitian Ibu DL melalui wawancara jika anak perempuan akhirnya diberikan kesempatan pendidikan maka tidak akan ada “*beleba*” untuk anak perempuan. Istilah “*beleba*” dalam budaya Lamaholot merupakan warisan yang diberikan oleh anak laki – laki kepada anak perempuan setelah anak laki – laki menerima warisan tersebut dari suku ataupun keluarga. Warisan ini bersifat temporer dimana anak perempuan hanya menerimanya sebagai hak pakai tanpa sepenuhnya memiliki.

Persepsi lain yang mengakibatkan anak perempuan ter subordinasi adalah paham akan kedudukan perempuan. “*Paha hopi beso ko mio te lura puke me*” sebuah penggalan kalimat dalam Bahasa Lamaholot yang sering digaungkan oleh masyarakat Waipukang, Ile Ape, Lembata sebagai bagian dari penganut budaya Lamaholot mengartikan bahwa dapur adalah tempat yang ideal untuk perempuan karena dia (perempuan) hanya merupakan bagian dari jual beli aktivitas adat. Perempuan tidak diberikan akses pendidikan karena sejatinya tempat perempuan adalah di dapur. Dapur memiliki makna yang begitu luas dan dalam. Tidak hanya tempat masakan berasal melainkan segala bentuk aktifitas perempuan yang dianggap kurang vital.

Fakta lain yang menjadikan paham ini begitu dipertanyakan adalah bagaimana anak perempuan dapat menerima konsep ini dengan lapang dada. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari KR sebagai responden wawancara bahwa terlahir sebagai anak perempuan merupakan anugerah yang harus disyukuri. Menjadi bulan – bulanan budaya bukanlah suatu persoalan karena sebagean besar anak perempuan memperoleh pengalaman yang sama. Yang menjadi perdebatan lanjutan adalah ketika fakta hasil observasi memberikan keterangan bahwa pada dasarnya anak laki – laki memiliki rasa ibah yang tinggi terhadap nasi saudari perempuannya. Tidak ada yang meminta untuk dilahirkan sebagai laki – laki atau perempuan sehingga tidak ada pilihan lain selain menerima dan menjalaninya.

Dari beberapa fakta diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akses pendidikan untuk anak perempuan begitu sulit karena terbelenggu oleh paham Lamaholot yang merupakan bagian dari budaya Patriarki. Menjadi bagian dari tanggungjawab atas masa depan keluarga dan suku adalah alasan pokok mengapa laki-laki diprioritaskan dan perempuan dinomorduakan.

Pembahasan

Budaya Lamaholot, mengandung paham patriarki sehingga segala dimensi kehidupan masyarakat dikendalikan oleh laki – laki. Laki – laki menjadi poros atau penggerak keberlangsungan aktivitas masyarakat Lamaholot baik dari segi ekonomi, sosial, budaya juga

pendidikan. Konsep pendidikan masyarakat setempat masih dipengaruhi oleh budaya Lamaholot. Terkesan konvensional namun paham ini tetap digemari sebagian besar masyarakat Lamaholot. Pendidikan yang seyogyanya menyetarakan peran perempuan dan laki – laki, dihipit oleh paham – paham patriarki sehingga perempuan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Undang – undang pendidikan No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan jelas menjabarkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari usaha dalam bentuk sadar dengan tujuan mendewasakan manusia. Konteks manusia, tidak eksplisit hanya pada gender tertentu namun lebih kepada kesetaraan tanpa adanya sekat – sekat perbedaan. Usaha terencana ini memiliki tujuan yang sangat mulia yakni mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Roziqina (2019) mengutarakan bahwa pada hakikatnya, seorang manusia dilahirkan untuk memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh akses kehidupan, salah satunya kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Ketimpangan gender terjadi akibat pemisahan yang bersifat tegas melalui pangakuan dan pengingkaran sosial, ekonomi dan politik. Bias gender yang terjadi di masyarakat tidak hanya bersifat kultural melainkan juga bersifat struktural. Kondisi ini didukung oleh Telnoni (2020) bahwa pada umumnya masyarakat telah membedakan kemampuan yang dimiliki laki - laki dengan perempuan sehingga perempuan selanjutnya akan kehilangan kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang hilang dapat menimbulkan berbagai macam masalah struktural sehingga perempuan enggan dipercaya oleh masyarakat dalam segala bidang termasuk pendidikan.

Wacana kesetaraan pendidikan tentu menjadi ancaman bagi budaya Lamaholot. Perempuan Lamaholot menjadi bagian dari yang tidak diperhitungkan dalam hal memperoleh pendidikan. Dasarnya terkoneksi dengan paham - paham Lamaholot yang dianut masyarakat. Konsep ini dijamin oleh Ardiyani (2017) bahwa budaya patriarki hingga saat ini masih melekat kuat dalam tatanan masyarakat dimana terdapat anggapan bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap kaum laki-laki dan perempuan merupakan kaum yang lemah. Anggapan masyarakat akan disparitas perempuan dan laki – laki mengakibatkan kesenjangan memperoleh pendidikan anak laki – laki dan perempuan. Jelas bahwa anak laki – laki menjadi prioritas dalam memperoleh akses pendidikan sedangkan perempuan hanya sebagai pelengkap yang mungkin akan diberikan pendidikan apabila akses pendidikan untuk laki – laki telah dipenuhi.

Pengambilan keputusan dalam budaya Lamaholot, menitikberatkan pada laki – laki termasuk keputusan menyekolahkan anak. Eksistensi budaya Lamaholot yang bersifat statis ini, memberikan pengakuan dan kesempatan lebih kepada laki – laki untuk mengenyam pendidikan, sementara perempuan hanya menunggu kesempatan selanjutnya tanpa kepastian yang valid. Fenomena ini disetujui oleh Nursaptini (2019) masyarakat patriarki menganggap perempuan tidak perlu diberikan kesempatan pendidikan karena pada akhirnya akan mengerjakan pekerjaan “di dapur”.

Alfian Rokhmansyah (2013) dalam Sakina (2017) memberikan pendapat bahwa patriarki merupakan struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sementara itu, berdasarkan paham Lamaholot, kesempatan pendidikan hanya diperuntukan kepada laki – laki dan merupakan hak yang wajib dipenuhi. Penyebabnya adalah karena laki – laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Kedudukan ini diperoleh dari kalkulasi bagaimana peran vital anak laki – laki kedepan. Sebagai ahli waris dan penopang hidup suku dan keluarga, laki – laki dianggap layak untuk menerima pendidikan sedangkan perempuan dinomorduakan dengan dalil yang kontradiktif.

Diskriminasi pada kaum perempuan akan akses pendidikan dalam paham Lamaholot, bukan menjadi sesuatu yang tabu. Sulistyowati (2020) menyampaikan bahwa kendati terdapat upaya peningkatan kesetaraan gender dalam hal pendidikan terus digaungkan, paham patriarki tetap terus hidup dan membelenggu kaum perempuan. Tatanan budaya Lamaholot meyakini bahwa pasca menikah perempuan tidak lagi menjadi bagian dari keluarganya sehingga kerugian akan dialami oleh keluarga apabila anak perempuan diberikan akses pendidikan. Dalil ini jelas terjadi karena fakta menyampikan bahwa kontribusi anak perempuan kepada keluarga dan suku sepenuhnya akan dihapuskan apabila telah menikah.

Sistem pernikahan Lamaholot sepertinya menjadi penggerak dimana perempuan dinomorduakan dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Timbul persepsi lain bahwa tanpa pendidikan, perempuan dapat menjadi sumber pendapatan keluarganya. Sumber pendapatan yang dimaksud adalah *belis* atau mas kawin hasil pernikahan sepenuhnya akan menjadi milik keluarga. Perlu diketahui bahwa mas kawin budaya Lamaholot memiliki nilai yang besar sehingga keuntungan menjadi patokan perempuan diukur. Konsep ini sejalan dengan pemikiran dari Roziqin (2019) bahwa akibat budaya patriarki alhasil melonjaknya angka pernikahan dini karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan untuk keluar dari pemahaman ini.

Implikasi paham dari budaya Lamaholot adalah pada pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk memberikan pendidikan kepada anak. Anak perempuan menjadi bagian yang tidak diperhatikan dalam proses ini dengan alasan yang telah dimaklumi oleh masyarakat. Pandangan ini bertolakbelakang dengan yang disampaikan oleh Ratnawati (2019) bahwa konsep pendidikan yang baik adalah memberikan hak yang sama terhadap semua generasi tanpa distingsi dari ras, suku, daerah, warna kulit dan kelamin. Pengambilan keputusan tersebut juga menjadi hak dari laki – laki (ayah) sehingga perempuan (ibu) yang dianggap pelengkap atau orang kedua tidak memiliki akses untuk membela anak perempuannya. Model pengambilan keputusan seperti ini dijelaskan lebih lanjut oleh Kollo (2017) bahwa yang mendominasi pengambilan keputusan pada penganut patriarki adalah laki – laki karena perempuan dalam paham tersebut dilihat sebagai pelengkap atau orang kedua. Kendatipun kepentingan dan pendapat laki-laki, perempuan dan minoritas merupakan bagian integral dari proses pengambilan keputusan, namun keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat rendah.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian akan aspirasi, kepentingan dan peranan perempuan dibutuhkan strategi yang bersifat global sehingga tidak lagi terdapat disparitas harkat, kodrat dan martabat antara laki - laki dan perempuan dalam segala bidang khususnya bidang pendidikan. Secara normatif, peran negara dalam memberdayakan perempuan dalam segala bidang diwujudkan dalam UUD 1945 pasal 28, ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konsep UUD, Ham diartikan sebagai kesetaraan setiap individu untuk berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta budaya untuk meningkatkan taraf kesejateraan. (Utomo: 2019). Dengan demikian, perempuan maupun laki - laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar mendewasakan manusia atau memanusiakan manusia seyogyanya juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan yang adil kepada laki - laki dan perempuan. Melalui UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, diharapkan paradigma baru ini lebih memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pertimbangan paham budaya Lamaholot, anak laki – laki menjadi prioritas orang tua dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan, sedangkan anak perempuan tidak menjadi bagian yang diprioritaskan.
2. Dampak dari budaya Lamaholot adalah kesenjangan akses pendidikan antara anak laki – laki dan perempuan.
3. Pendidikan yang seyogyanya menyetarakan peran perempuan dan laki – laki, dihipit oleh paham – paham patriaki pada budaya Lamaholot sehingga perempuan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Saran

Perlu dibangun pemahaman yang konstruktif kepada seluruh masyarakat serta mengajak masyarakat penganut budaya Lamaholot untuk lebih terbuka kepada dialog dan kritik budaya yang selalu bersifat dinamis, sehingga hak-hak asasi perempuan tidak lagi dibelenggu oleh hukum kodrat, hukum adat istiadat, hukum suku, dan hukum budaya Lamaholot yang merupakan bagian dari budaya patriarki, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Rokhmansyah (2016), *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminis*. Yogyakarta: Garudhawaca
- Anwar (2017), *Implikasi Budaya Patriarki dalam Kesetaraan Gender di Lembaga Pendidikan Madrasah (Studi Kasus pada Madrasah di Kota Parepare)*, dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 10 No, 1 (Juni 2017).
- Ardiyani, Dian (2017), *Konsep Pendidikan Perempuan Siti Walidah*, dalam *Jurnal Tajdida*, Vol 15 No, 1 (Juni 2017).
- Kiram, Muhammad Zawil (2020), *Pendidikan Berbasis Gender dalam Keluarga Masyarakat Aceh*, dalam *Jurnal Community*, Vol 6 No, 2 (Oktober 2020).
- Kollo, Fredik Lambertus (2017), *Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik*, dalam *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta (November 2017).
- Nursaptini, dkk (2019), *Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan*, dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 12 No, 2 (Desember 2019).
- Ratnawati, Sulistyorini & Ahmad Zainal Abidin (2019), *Kesetaraan Gender tentang Pendidikan Laki – laki dan Perempuan*, dalam *Jurnal Harkat*, Vol 15 No, 1 (November 2019).
- Roziqin, dkk (2019), *Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender di Provinsi Jawa Tengah*, dalam *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 16 No, 2 (November 2019).
- Sakina, Ade Irma & Dessy Hasannah Siti A (2017), *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, dalam *Jurnal Sosial Work*, Vol 7 No, 1 (Juli 2017).
- Sulistyowati, Yuni (2020), *Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial*, dalam *Jurnal Studi Gender*, Vol 1 No, 2 (Januari 2020).
- Sutisna, Deni (2019), *Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan*, dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 12 No, 2 (Desember 2017)
- Telnoni, Benyamin (2020), *Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Membelajarkan Kesetaraan Gender Pada Anak Usia Dini*, dalam *Jurnal Abdiel*, Vol 4 No, 2 (Oktober 2020)
- Utami, Rizka Hidayatul (2019), *Relevansi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Pengarusutamaan Gender*, dalam *Jurnal Islamic Education Policy*, Vol 4 No, 1 (Januari 2019)
- Utomo, Susilo Setyo dan Uni Ekowati (2019), *Pendidikan Responsif Gender bagi Anak Usia Dini*, dalam *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, Vol 3 No, 1 (November 2019)